

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) terdapat tujuan didirikannya negara Republik Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal tersebut, kesejahteraan mencakup semua hal yang terkait dengan keberlangsungan hidup warga negara yang mana kewajiban tersebut harus dapat terpenuhi. Namun dilihat dari faktanya, tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia masih sangat rendah dengan ditandai masih banyaknya masyarakat miskin yang diakibatkan oleh salah satu faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan. Oleh karena itu, kewajiban tujuan alinea ke-4 menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah, karena pada dasarnya kedua tujuan tersebut saling berkaitan guna mengeluarkan masyarakat dari zona kemiskinan.

Rendahnya tingkat pendidikan dalam golongan masyarakat jadi salah satu pemicu terbentuknya kemiskinan di Indonesia. Pendidikan ialah salah satu keperluan ataupun kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi oleh tiap orang, maka jika tingkat pendidikannya rendah dapat mengakibatkan seseorang cenderung tidak memiliki wawasan, pengetahuan bahkan keterampilan. Hal ini dapat mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia karena kurangnya pengetahuan bahkan keterampilan yang dimiliki masyarakat. Tingginya angka pengangguran juga disebabkan karena keterbatasan lapangan

pekerjaan, sehingga mengakibatkan masyarakat tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak menjamin adanya penghasilan tetap yang digunakan untuk memenuhi kehidupan pokok sehari-hari. Padahal di era globalisasi saat ini harga kebutuhan pokok sering mengalami kenaikan.

Kemiskinan merupakan persoalan utama yang harus dihadapi oleh negara Indonesia. Bersumber pada data Badan Pusat Statistik jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2010-2015 mengalami ketidakstabilan, bahwasannya tingkat kemiskinan menghadapi penyusutan serta peningkatan dalam sebagian tahun tertentu. Seperti pada tahun 2010 hingga 2014 angka kemiskinan perlahan mengalami penurunan, meskipun di tahun 2013 data kemiskinan bulan Maret – September sedikit mengalami kenaikan. Tidak hanya itu bahwasannya angka kemiskinan juga mengalami kenaikan di tahun 2014-2015. Berikut merupakan data angka kemiskinan dari tahun 2010-2015:

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia
Tahun 2010-2015

Tahun	Maret (Juta Jiwa)	September (Juta Jiwa)
2010	31,02	-
2011	30,02	29,89
2012	29,13	28,59
2013	28,07	28,55
2014	28,28	27,73
2015	28,59	28,51

Sumber: Badan Pusat Statistik. Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Berdasarkan tabel 1.1, jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami perkembangan yang fluktuatif atau berubah-ubah. Maret 2010 persentase angka

kemiskinan mencapai 13,33%, kemudian pada September 2011 persentase penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 12,36%. Menurunnya jumlah penduduk miskin bertahan hingga Maret 2013 yang mencapai 11,37%, karena September 2013 penduduk miskin mengalami kenaikan sebesar 0,1% sehingga persentase naik mencapai 11,47%. Kemudian September tahun 2014 persentase angka kemiskinan berkurang jadi 10,96%, tapi bulan Maret 2015 mengalami kenaikan lagi hingga 0,26%, meskipun pada September 2015 penduduk miskin menurun mencapai 11,13%.

Tidak stabilnya angka kemiskinan disetiap tahunnya juga terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Berikut data jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2010-2015 dari Badan Pusat Statistik.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2010-2015

Tahun	Maret (Juta Jiwa)	September (Juta Jiwa)
2010	-	5,36
2011	5,10	5,25
2012	4,97	4,86
2013	4,73	4,70
2014	4,83	4,56
2015	4,57	-

Sumber: Badan Pusat Statistik. Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Berdasarkan tabel 1.2 data jumlah penduduk miskin di tahun 2011 September mengalami kenaikan, sehingga persentase angka kemiskinan juga meningkat mencapai 16,21% dari bulan Maret yang sebesar 11,76%. Kemudian angka

kemiskinan ditahun berikutnya yaitu tahun 2012-2013 di Jawa Tengah mengalami penurunan hingga mencapai persentase sejumlah 14,44%. Penurunan kemiskinan ini tidak berlangsung hingga ke tahun-tahun berikutnya, karena di Maret 2014 kemiskinan bertambah sebanyak 0,02% dari September 2013, namun persentase kemiskinan di September 2014 sampai Maret 2015 mendapati penurunan dari Maret 2014 hingga mencapai 13,58%. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwasannya kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah ditahun 2010-2015 perkembangannya masih belum konstan serta masih berubah-ubah di tiap tahunnya.

Berdasarkan angka kemiskinan pada tahun 2010-2015 di tingkat nasional maupun tingkat provinsi, penduduk miskin belum mengalami pengurangan yang signifikan dan stabil. Dengan kata lain, menurunnya angka kemiskinan selama 5 tahun tersebut tidak dapat bertahan sangat lama, karena dapat dilihat bahwasannya angka kemiskinan seringkali mengalami kenaikan dan penurunan di beberapa waktu. Salah satu kabupaten/kota yang berada pada Provinsi Jawa Tengah yang angka kemiskinannya mencapai diatas batas rata-rata dan tergolong dalam kategori zona merah ialah Kabupaten Blora. Angka kemiskinan di Kabupaten Blora dari tahun 2010-2015 secara perlahan mengalami kemajuan karena perkembangan persentase serta jumlah dari penduduk miskin selama 5 tahun tersebut mengalami penurunan meskipun tidak signifikan. Berikut data angka kemiskinan Kabupaten Blora tahun 2010-2015 dalam bentuk tabel :

Tabel 1.3
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Blora
Tahun 2010-2015

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase (%)
2010	135,0	16,27
2011	134,9	16,24
2012	127,1	15,11
2013	123,8	14,64
2014	116,0	13,66
2015	115,0	13,52

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Berdasarkan tabel 1.3, angka kemiskinan di Kabupaten Blora menurun. Bahwasannya di tahun 2010 jumlah penduduk miskin sebanyak 135,0 ribu jiwa dengan persentase 16,27%. Kemudian ditahun setelah itu, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Blora sedikit mengalami pengurangan yang dapat dibuktikan pada tahun 2015 yaitu persentase penduduk miskin menjadi 13,52%, sehingga perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Blora menurun di setiap tahunnya secara bertahap.

Berdasarkan letak geografis, Kabupaten Blora menjadi bagian dari wilayah utara jawa yang tidak berbatasan dengan pantai. Oleh karena itu, daerah Kabupaten Blora kebanyakan berupa dataran rendah dimana terdapat banyak bukit pegunungan atau lembah gunung. Dapat dilihat, bahwasannya masyarakat Kabupaten Blora mayoritas menekuni profesi di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan, yang biasanya dapat ditemukan di kawasan perdesaan. Penduduk miskin di Kabupaten Blora kebanyakan berada di ruang

lingkup wilayah pedesaan, sehingga dalam memenuhi perekonomian atau kebutuhan hidup penduduk desa hanya mengandalkan hasil pertanian atau peternakan yang dimilikinya. Dapat diketahui bahwa desa seringkali menjadi objek terakhir yang diperhatikan oleh pemerintah, dengan kata lain pemerintah kabupaten kurang memberikan pelayanan yang baik kepada desa khususnya dalam hal membantu mengangkat perekonomian masyarakat.

Menindaklanjuti dengan adanya penurunan angka kemiskinan ditahun 2010-2015. Pemerintah Kabupaten Blora ikut serta pada kebijakan Presiden terkait dengan percepatan penanggulangan kemiskinan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015, dengan membentuk serta mengesahkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Blora. Dilakukannya percepatan dalam penanggulangan kemiskinan dengan membentuk Peraturan Bupati Blora yaitu sebagai urgensi untuk melakukan penanggulangan kemiskinan agar angka kemiskinan di Kabupaten Blora tidak mengalami kenaikan setelah beberapa tahun perkembangannya menurun. Selain itu, kebijakan ini diperlukan agar implementasi percepatan penanggulangan kemiskinan berjalan secara terencana dan sistematis dengan berpedoman pada peraturan yang ditetapkan. Peraturan Bupati ini tidak hanya dibuat untuk sekedar nama regulasi atau peraturan saja, melainkan diimplementasikan berbagai program dan kegiatannya serta

setelahnya dilakukan pengevaluasian untuk mengetahui keberhasilan dari implementasi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blora.

Selama implementasi dari percepatan penanggulangan kemiskinan, dapat dikatakan bahwasannya sejak tahun 2015 dari adanya Peraturan Bupati Blora Nomor 33 Tahun 2015, kondisi kemiskinan di Kabupaten Blora bertahun-tahun berangsur menurun dan mempertahankan peringkat yang sama pada tahun 2015 hingga 2019. Di tahun 2015, penduduk miskin di Kabupaten Blora berjumlah 115.000 jiwa, kemudian tahun 2019 jumlah penduduk miskin mendapati penurunan drastis sebanyak 97.860 jiwa, sehingga dapat dikatakan bahwa implementasi percepatan penanggulangan kemiskinan ini mampu membawa masyarakat menuju kesejahteraannya. Namun penurunan kemiskinan tersebut tidak berlangsung pada tahun 2020, dikarenakan kemiskinan di tahun tersebut mengalami kenaikan dan menjadikan peringkat kemiskinan Kabupaten Blora mengalami perubahan yang cukup signifikan menjadi peringkat ke-23 se Jawa Tengah, yang mana pada tahun sebelumnya dari tahun 2015 Kabupaten Blora menduduki posisi peringkat 21 se Jawa Tengah.

Dari hal tersebut perlunya mengevaluasi adanya implementasi percepatan penanggulangan kemiskinan yang didasarkan dan berpedoman atas Peraturan Bupati Blora Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, agar implementasi percepatan penanggulangan kemiskinan

tersebut dapat berjalan secara efektif di tahun-tahun berikutnya guna membantu mengurangi kemiskinan di Kabupaten Blora.

Evaluasi implementasi percepatan penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu tahap dari kebijakan publik untuk menentukan apakah percepatan penanggulangan kemiskinan tersebut dapat berjalan secara efektif selama ini serta mampu mencapai keberhasilan seperti yang diharapkan. Evaluasi kebijakan merupakan salah satu upaya dalam menentukan suatu kemanfaatan atau kegunaan dari adanya program ataupun kebijakan. Terkait dengan ketepatan tujuan dan sasaran mengenai kebijakan biasanya seringkali dipertanyakan untuk mengetahui ke-efektifannya, maka dari itu evaluasi dapat pula berkaitan dengan suatu metode guna mengevaluasi tujuan dan sasaran dari kebijakan. Dapat diketahui, evaluasi dari suatu kegiatan ataupun kebijakan dapat memandu bagaimana evaluasi dilaksanakan, karena evaluasi ini menjadi suatu penanda bagi seluruh organisasi, kelompok, dan pemangku kepentingan terkait dengan apa yang terjadi dan yang harus dilakukan dalam suatu kebijakan.

Pada dasarnya evaluasi dilakukan apabila dalam pelaksanaan suatu kebijakan mengalami kegagalan. Menurut Trochim dalam (Handoyo, 2012), evaluasi kebijakan berperan penting dalam memberi *feedback* yang terjadi dalam adanya praktik/program/teknologi terkait dalam suatu kebijakan. Salah satu kebijakan atau program yang dapat dievaluasi pelaksanaannya yaitu terkait dengan bagaimana keberlangsungan dari upaya mempercepat menanggulangi

kemiskinan di Blora. Percepatan penanggulangan kemiskinan merupakan suatu kebijakan dari program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka untuk meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.¹ Percepatan penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintahan desa, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.² Dalam hal ini, upaya yang dilakukan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dapat berupa pemberian bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program-program yang lainnya. Upaya menanggulangi kemiskinan diperlukan waktu dan proses yang cukup lama untuk membantu masyarakat keluar dari ruang lingkup kemiskinan, maka dari itu dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 33 tahun 2015 yang mengatur tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ditindaklanjuti dengan dibentuknya tim yang dinamakan dengan Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah merupakan implementor atau pelaksana dari peraturan bupati yang beranggotakan gabungan dari dinas atau birokrasi di Kabupaten Blora, serta

¹Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). *Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah*. Jakarta Pusat : Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, 2011. Hlm 3.

²Peraturan Bupati Blora Nomor 33 Tahun 2015, Pasal 1 angka 10.

menjadi wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk meningkatkan koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah. Maka dari itu Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah ini dibentuk hingga tingkat desa/kelurahan supaya pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal. Melalui hal tersebut, saya tertarik dan berkeinginan untuk melakukan penelitian tentang bagaimana hasil implementasi dari percepatan penanggulangan kemiskinan yang berdasarkan Peraturan Bupati Blora Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Jika dilihat berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, maka dari penelitian terdahulu itu setidaknya dapat memberikan suatu gambaran mengenai upaya pemerintah daerah di tingkat kabupaten terkait percepatan penanggulangan kemiskinan. Menurut (Faisal & Erman, 2014) dalam penelitiannya memaparkan bahwa keberhasilan dari penanggulangan kemiskinan dapat ditentukan dari beberapa faktor berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam hal ini banyak yang dapat menjadi faktor keberhasilan dari program percepatan penanggulangan kemiskinan yaitu dengan mempertimbangkan wilayah prioritas dan target intervensi pengurangan kemiskinan, penganggaran program, strategi kebijakan, pemantauan serta koordinasi program penanggulangan dalam upaya percepatan penanggulangan

kemiskinan meskipun dalam pelaksanaan kebijakannya terdapat adanya faktor penghambat.

Berdasarkan penelitian (Derlauw & Sri, 2016), pada artikelnya memaparkan tentang pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dan aspek yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program tersebut. Dalam penelitiannya, implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan tersebut masih memiliki banyak kekurangan dimana, bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran karena komunikasi, sumberdaya, standar, dan sasaran serta sikap yang menjadi aspek penghambat pelaksanaannya. Kondisi seperti itu sangat mungkin terjadi sehingga diperlukan kerjasama dan pertimbangan yang kuat agar kebijakan dapat terlaksana secara optimal. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh (Nuraida, Budiman, Sintaningrum, & Mudyati, 2019), bahwa dalam penulisannya menjelaskan mengenai evaluasi kebijakan dari percepatan penanggulangan kemiskinan yang ternyata terdapat hambatan yang mempengaruhi kinerja dari kebijakan. Adanya hambatan tersebut berdampak pada manfaat kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan, sehingga target sasaran dari program kebijakan tersebut tidak berpengaruh bagi kehidupan mereka.

Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti berkeinginan untuk melaksanakan penelitian yang lebih dalam lagi tentang percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blora dengan mengambil sudut pandang yang berbeda. Bahwasannya peneliti sebelumnya lebih membahas

terkait faktor-faktor penghambat dari keberlangsungan kebijakan meskipun berada dalam daerah yang berbeda. Oleh sebab itu, penelitian ini peneliti berusaha mencoba menekankan pembahasan mengenai hasil implementasi yang didapatkan dari Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Blora selaku implementor dari percepatan penanggulangan kemiskinan beserta evaluasi dari implementasi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blora. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui apakah implementasi percepatan penanggulangan kemiskinan mampu mencapai keberhasilan dan dapat berlangsung secara efektif untuk tahun-tahun yang selanjutnya.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana implementasi dan hasil dari percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blora tahun 2016-2020?
2. Bagaimana evaluasi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blora tahun 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan yang diuraikan tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu mengetahui berhasil atau tidaknya keberlangsungan implementasi percepatan penanggulangan kemiskinan untuk mengevaluasi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blora.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Meningkatkan pengetahuan dan memberikan wawasan baru kepada penulis sehingga dapat menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Meningkatkan pengetahuan bahwa Pemerintahan Kabupaten Blora sudah melakukan upaya pengentasan kemiskinan dengan adanya Peraturan Bupati Blora tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- c. Penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan, menambah informasi, serta dapat digunakan sebagai sumber referensi atau bahan pustaka bagi peneliti selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Dapat memberikan masukan/saran atau rekomendasi kepada Bupati Blora mengenai percepatan penanggulangan kemiskinan.
- b. Dapat memberikan wawasan terkait adanya percepatan penanggulangan kemiskinan, serta mengajak masyarakat untuk mendukung dan ikut serta dalam pengimplementasian program dan kegiatannya.
- c. Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Blora dalam memilih dan melaksanakan program terkait percepatan penanggulangan kemiskinan di tahun-tahun berikutnya.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi menggambarkan tentang sesuatu tahapan yang bernilai dalam kebijakan publik untuk mengetahui keberlanjutan atau tidaknya suatu kebijakan. Keberlanjutan dari kebijakan bisa dilihat dari hasil evaluasi, maka dari itu dalam mengevaluasi kebijakan harus dilakukan secara serius berdasarkan ukuran-ukuran atau ketentuan yang sudah ditetapkan. Pada dasarnya, evaluasi seringkali dilaksanakan guna melihat apakah suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan atau tidak. Oleh sebab itu, evaluasi dapat dikatakan sebagai aktivitas yang memiliki tujuan untuk menilai sesuatu manfaat dalam kebijakan (Situmorang, 2016).

Evaluasi mempunyai sebagian definisi dari sebagian pakar diantaranya menurut Aderson dalam (Akbar & Widya, 2018), yaitu evaluasi sebagai suatu proses untuk memastikan hasil yang sudah dicapai dari sebagian aktivitas yang direncanakan untuk menunjang tercapainya suatu tujuan. Bahwasannya evaluasi menjadi suatu tujuan untuk melihat apakah tujuan tersebut dapat direalisasikan secara baik atau tidak. Selain itu, evaluasi merupakan usaha untuk mengukur serta memberikan nilai dengan obyektif terkait dengan pencapaian hasil yang sudah ditetapkan bahkan direncanakan sebelumnya (Abdoellah & Yudi, 2016). Dalam hal ini, evaluasi seringkali menjadi salah satu proses penilaian sistematis dengan standar atau ketentuan tertentu, maka dari itu melalui evaluasi dapat memberikan hasil dari pogram dan kebijakan

yang telah dibuat. Tujuan terdapatnya evaluasi kebijakan yaitu untuk mengetahui apakah kebijakan layak buat dilanjutkan ataupun tidak, selain itu bisa menjadi tolak ukur dalam membuat kebijakan yang tepat, dan untuk menilai sejauh mana tujuan dapat dicapai dan keefektifan kebijakan publik bisa dipertanggungjawabkan, menurut Rian dalam (Yunus, 2014). Dengan kata lain, evaluasi kebijakan merupakan bagian analisis kebijakan publik yang bernilai dengan tujuan memastikan suatu program kebijakan yang ditetapkan mampu mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana yang dibuat, oleh sebab itu evaluasi kebijakan bisa diartikan sebagai suatu aktivitas atau kegiatan untuk menilai tingkatan pencapaian dari tujuan suatu kebijakan.

Evaluasi kebijakan merupakan bagian setelah adanya implementasi kebijakan publik untuk menilai pelaksanaan kebijakan, yang mana evaluasi ini menjadi proses untuk memonitor dan menilai hasil suatu kebijakan (Kadji, Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas, 2015). Menurut Muhadjir dalam (Aryani, 2018) bahwasannya evaluasi kebijakan yakni sebuah proses dalam menilai keberhasilan dari kebijakan publik dengan menyamakan perolehan hasil diantara tujuan atau sasaran kebijakan publik yang ditetapkan. Dapat diketahui, salah satu model evaluasi kebijakan dari tokoh ilmuwan yaitu Model Evaluasi William Dunn. Menurut William Dunn, evaluasi kebijakan memiliki 2 (dua) sudut pandang yang saling berhubungan yakni penggunaan berbagai macam tata cara yang diperuntukkan dalam pemantauan hasil

kebijakan publik, program dan aplikasi serangkaian nilai guna memastikan kegunaan hasil. Evaluasi kebijakan dibagi jadi 3 (tiga) yang berdasarkan dengan waktu evaluasi yaitu saat sebelum pelaksanaan; saat penerapan/pelaksanaan (evaluasi proses); setelah dilaksanakan (evaluasi konsekuensi/evaluasi sumatif). Terdapat tiga pendekatan evaluasi kebijakan menurut William Dunn yang dikutip dalam (Akbar & Widya, 2018), yaitu:

1) Evaluasi Semu

Evaluasi semu ialah pendekatan yang memakai metode deskriptif demi memperoleh data yang valid mengenai hasil kebijakan tanpa mempertanyakan manfaat dan nilai dari hasil tersebut, karena anggapan dari evaluasi ini bahwasannya patokan/ukuran mengenai manfaat ataupun nilai merupakan suatu yang bisa dibuktikan sendiri.

2) Evaluasi Formal

Evaluasi formal yaitu pendekatan yang memakai metode, deskriptif untuk, mendapatkan data yang benar serta dapat dipercaya terkait hasil kebijakan atas dasar tujuan dari program kebijaksanaan yang sudah dikabarkan secara resmi oleh pembentuk kebijakan serta administrator program.. Evaluasi ini memiliki anggapan utama yaitu tujuan dan sasaran yang diumumkan secara resmi merupakan dimensi yang sesuai untuk manfaat ataupun nilai kebijakan program. Perihal ini evaluasi formal memakai undang-undang, dokumen-dokumen program, serta wawancara

guna mengidentifikasi bahkan mendefinisikan tujuan dan sasaran kebijakan.

Evaluasi formal memiliki jenis utama, salah satunya yaitu evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif yakni berusaha memantau suatu kebijakan ataupun program yang diterapkan buat jangka waktu tertentu terhadap pencapaian tujuan serta sasaran resmi. Evaluasi ini dibuat untuk menilai suatu produk kebijakan dan program publik yang normal. Selain evaluasi sumatif, terdapat tipe evaluasi formatif yang meliputi usaha secara terus menerus untuk melakukan pemantauan dalam pencapaian tujuan-tujuan beserta sasaran resmi/formal. Dapat diketahui bahwasannya evaluasi formal ini dapat bersifat sumatif maupun formatif, namun keduanya dapat meliputi *control* langsung ataupun tidak langsung terhadap suatu kebijakan dan bermacam proses.

3) Evaluasi Keputusan Teoritis

Evaluasi keputusan teoritis merupakan suatu pendekatan dengan memakai metode deskriptif guna mendapatkan data yang terpercaya tentang hasil kebijakan secara eksplisit yang dinilai oleh berbagai macam pemangku kebijakan. Pendekatan ini berupaya memunculkan serta membuat eksplisit tujuan dan target dari pelaku kebijakan, baik yang dinyatakan maupun tersembunyi. Perihal ini, tujuan dan sasaran dari pembentuk kebijakan dan administrator merupakan salah satu sumber nilai, dikarenakan seluruh pihak yang berfungsi dalam memformulasikan dan

mengimplementasikan, suatu kebijakan dilibatkan dalam merumuskan tujuan dan target yang mana akan diukur nantinya.

Fungsi evaluasi kebijakan William Dunn evaluasi memainkan beberapa fungsi utama pada analisis kebijakan, diantaranya:

- 1) Evaluasi memberikan data yang dapat dipercaya terkait kinerja kebijakan ialah tentang seberapa jauh kebutuhan, nilai dan peluang yang bisa dicapai melalui tindakan publik.
- 2) Evaluasi memberi sumbangan klarifikasi dan kritik tentang nilai-nilai yang jadi dasar pemilihan target serta tujuan. Nilai ini dapat diperjelas dengan menggambarkan dan mengoperasikan sasaran serta tujuan. Selain itu, mengkritik nilai dengan bertanya secara sistematis mengenai kepantasan, target dan tujuan dalam suatu ikatan dengan persoalan yang hendak dicapai.
- 3) Evaluasi memberikan sumbangan pada aplikasi metode analisis kebijakan yang lain, hal ini termasuk dalam “perumusan masalah” serta “rekomendasi”. Informasi terkait tidak memadainya, kinerja suatu kebijakan dapat memberikan sumbangan pada formulasi ulang permasalahan kebijakan, contohnya dengan, menampilkan sasaran dan tujuan yang memerlukan definisi ulang. Selain itu, evaluasi juga ,dapat menyumbang, definisi alternatif kebijakan yang baru atau perbaikan dengan menunjukkan bahwasannya alternatif yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus bahkan diganti dengan yang lain.

Keberhasilan dan, kegagalan dari suatu kebijakan, dapat dinilai dari beberapa kriteria evaluasi yang, telah dikembangkan. Hal ini contohnya seperti indikator yang dikembangkan oleh William Dunn dalam bukunya, yang mana terdapat 6 (enam) kriteria atau aspek yang dapat digunakan dalam mengevaluasi kebijakan, yang mencakup sebagai berikut:

KRITERIA	PERTANYAAN
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan sudah dicapai?
Efisiensi	Seberapa banyak usaha dibutuhkan untuk menggapai hasil yang diinginkan?
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan mampu memecahkan permasalahan
Perataan	Apakah biaya serta manfaat telah didistribusikan secara menyeluruh kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, ataupun nilai-nilai kelompok-kelompok tertentu?
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar bermanfaat ataupun bernilai.

Sumber: William Dunn, (1990:610), terj.

Pendekatan evaluasi formal adalah pendekatan yang akan penulis gunakan sebagai kerangka penelitian ini. Selain itu peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan William Dunn untuk menganalisis percepatan penanggulangan kemiskinan ini, dengan mengacu pada 6 (enam) kriteria evaluasi terhadap aspek-aspek kinerja kebijakan. Penulis menggunakan pendekatan formal, dikarenakan pendekatan ini terlihat lebih relevan dengan penelitian ini. Selain itu pendekatan ini digunakan untuk menganalisis tingkat keberhasilan yang di capai dari suatu program dan kegiatan dengan

memperhatikan variabel atau indikator-indikator dalam evaluasi kebijakan publik.

1.5.2 Kemiskinan

Definisi kemiskinan dari tahun ke tahun sudah semakin menghadapi perluasan beriring dengan kompleksnya aspek pemicu, indikator ataupun persoalan yang terjadi. Kemiskinan merupakan permasalahan utama untuk tiap negara khususnya negara berkembang, dimana pengentasan kemiskinan dengan menciptakan kesejahteraan rakyat merupakan tujuan dari suatu negara. Kemiskinan yaitu suatu keadaan seorang yang tidak sanggup untuk memenuhi keperluan/kebutuhan hidupnya. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan di definisikan sebagai tidak mempunya masyarakat dari sisi perekonomian dalam pemenuhan kebutuhan dasar makanan maupun non makanan. Pada 2004 World Bank mendefinisikan kemiskinan secara detail seperti yang dikutip dalam (Soleh, 2014), yakni:

“Kemiskinan adalah kelaparan. Kemiskinan merupakan ketiadaan tempat tinggal. Kemiskinan adalah sakit dan tidak sanggup untuk periksa ke dokter. Kemiskinan adalah tidak memiliki akses ke sekolah serta tidak mengetahui bagaimana caranya membaca. Kemiskinan adalah tidak memiliki pekerjaan dan takut/khawatir tentang kehidupan di masa yang akan datang. Kemiskinan adalah kehilangan anak karena penyakit yang diakibatkan oleh air yang tidak bersih. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, ketiadaan keterwakilan dan kebebasan.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang lumayan serius bagi keberlangsungan kehidupan manusia, maka dari itu untuk mengangkat

manusia dari masalah kemiskinan diperlukan berbagai cara untuk mengatasinya. Sebelum menanggulangi permasalahan kemiskinan, perlu terdapatnya kebijaksanaan yang pas yaitu mengenali keadaan kalangan masyarakat yang berkehidupan tepat di bawah garis kemiskinan, karena biasanya suatu kondisi disebut miskin dapat ditandai bahkan diisyaratkan dengan adanya kekurangan ataupun ketidakmampuannya memenuhi tingkatan kebutuhan dasar (Kadji, 2013). Tingkat kebutuhan dasar yang dimaksud memiliki dua aspek, diantaranya berupa aspek primer (miskinnya aset pembelajaran dan keahlian) dan aspek sekunder (miskinnya jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informal, semacam kurangnya air, gizi, perumahan, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan pembelajaran yang relatif rendah (Kadji, 2013). Selain itu, World Bank dalam (Aidha & dkk, 2020) menyatakan bahwa seseorang dapat dianggap miskin apabila memiliki penghasilan yang kurang dari standar pendapatan tertentu.

Kemiskinan memiliki beberapa kriteria dalam menentukan seseorang berada golongan miskin. Terdapat beberapa golongan tipe kemiskinan yaitu adanya *kemiskinan persistem* yaitu suatu situasi dimana orang ataupun keluarga secara konsisten tetap miskin untuk masa yang relatif lama. Menurut Berrick dalam (Pratama, 2014), tipe ini ialah masyarakat yang mempunyai tunjangan kesejahteraan sepanjang kurang lebih dari 8 tahun; dan *kemiskinan transien* yaitu keadaan dimana kehidupan individu atau keluarga secara temporer dapat jatuh di bawah garis kemiskinan bila terjadi adanya PHK,

jatuh sakit dan kenaikan biaya pendidikan, menurut Pandji Indra dalam (Pratama, 2014).

Selain itu, jika dilihat dari sasaran, kemiskinan digolongkan dalam berbagai tipe agar tujuan program yang berkaitan tentang kemiskinan ataupun penanggulangannya memiliki target yang jelas. Menurut Sumodiningrat seperti dikutip dalam (Pratama, 2014), kemiskinan dibagi menjadi tiga kategori diantaranya:

1. Kemiskinan absolute, yaitu pendapatan di bawah garis kemiskinan dan tidak bisa dipenuhi kebutuhan dasarnya.
2. Kemiskinan relatif, ialah kondisi kemiskinan yang terletak di atas garis kemiskinan yang berdasar pada jarak antara miskin dan non miskin dalam suatu komunitas.
3. Kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi saat individu ataupun kelompok masyarakat enggan untuk memperbaiki kondisi kehidupannya hingga pada saat ada bantuan untuk mendorong mereka keluar dari keadaan tersebut.

Terkait dengan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa kemiskinan memiliki pengertian yang kompleks meskipun inti dari pengertian tersebut sama yaitu kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana orang atau keluarga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup karena minimnya perekonomian yang dimilikinya. Kemiskinan sangat berpengaruh terhadap kemajuan dari suatu negara bahkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu peran pemerintah selaku pemegang kekuasaan tertinggi di negara sangatlah penting, dalam mengentas kemiskinan.

Dari penelitian yang akan dilakukan, peneliti menggunakan teori kemiskinan dari Sumodiningrat yang berfungsi untuk membantu mengetahui kriteria atau indikator kemiskinan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blora. Maka dari itu, adanya teori kemiskinan tersebut sedikitnya dapat memudahkan peneliti dalam menganalisis evaluasi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blora.

Pada dasarnya, kemiskinan merupakan permasalahan yang perlu ditanggulangi oleh pemerintah karena kondisi kemiskinan menyangkut dengan kesejahteraan hidup masyarakat. Bahwasannya masyarakat yang tergolong dalam kategori masyarakat miskin dapat dikatakan bahwa seorang atau individu tersebut mengalami kekurangan sehingga tidak memiliki kebebasan untuk mencapai sesuatu karena adanya keterbatasan seperti perekonomian. Maka dari itu, perlunya penanggulangan kemiskinan supaya seseorang atau individu dapat hidup dengan sejahtera tanpa adanya kekurangan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan

1.5.3 Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan merupakan suatu tindakan yang dilakukan baik secara ekonomi maupun kemanusiaan untuk mengangkat seorang individu atau keluarga keluar dari zona kemiskinan secara permanen. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan melindungi kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara baik yang diakibatkan oleh dampak negatif krisis

ekonomi dan kemiskinan struktural. Selain itu, pada penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan cara memberdayakan kelompok masyarakat miskin yang bersifat berkelanjutan misalnya seperti mengembangkan usaha mikro dan kecil di berbagai kegiatan ekonomi atau kegiatan lainnya yang dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blora dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara top-down melalui kebijakan Peraturan Bupati. Konsep pendekatan top-down ini yaitu perencanaan terkait penanggulangan kemiskinan dengan segala keputusan hingga jenis program dan kegiatannya ditentukan oleh pemerintah, yang mana pemerintah menanggung semua kegiatan yang ditujukan untuk masyarakat miskin sebagai penerima bantuan dari pemerintah. Pemerintah Kabupaten Blora dalam penanggulangan kemiskinan ini dengan membentuk Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Blora, tetapi dalam pembentukan tersebut pemerintah kembali membentuk Peraturan Bupati Blora dengan memperbarui atau mengubah peraturan menjadi Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Blora. Perubahan peraturan tersebut dilaksanakan dalam satu tahun yang sama yaitu tahun 2015, yang mana terdapat beberapa ketentuan pasal yang diubah. Perubahan tersebut

lebih mengacu pada pergantian hak dan kewajiban yang seharusnya di dapatkan serta dilaksanakan oleh masyarakat miskin. Selain itu juga terdapat adanya penambahan serta pengurangan terkait tanggung jawab dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam mengimplementasikan percepatan penanggulangan kemiskinan, dan perubahan terkait dengan penamaan tim koordinasi yang awalnya hanya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan menjadi Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dilakukannya perubahan dalam Peraturan Bupati ini supaya dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blora dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Pada penelitian yang berjudul “Evaluasi Implementasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Blora Tahun 2021” menggunakan dua konsep utama yaitu:

1. Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan publik merupakan tahap terakhir dari analisis kebijakan publik untuk mengetahui apakah suatu kebijakan/program dilaksanakan sesuai rencana yang ditetapkan. Dengan kata lain, konsep evaluasi ini yaitu melihat hasil dari suatu kebijakan yang sudah mencapai tujuan atau tidak, sehingga dengan adanya evaluasi dapat memberikan

dampak bagi pemangku kepentingan untuk memutuskan suatu kebijakan dapat dilanjutkan kembali atau dihentikan.

2. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Percepatan penanggulangan kemiskinan merupakan upaya membantu mengurangi angka kemiskinan di suatu daerah dengan memberikan perubahan yang lebih baik pada masyarakat. Konsep percepatan penanggulangan kemiskinan yaitu memberantas kemiskinan dengan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat supaya keluar dari zona kemiskinan dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak.

Dari konsep tersebut, penelitian ini dapat dioperasionalkan dengan menggunakan teori William Dunn bahwasannya terdapat 6 aspek evaluasi dalam kinerja kebijakan yaitu:

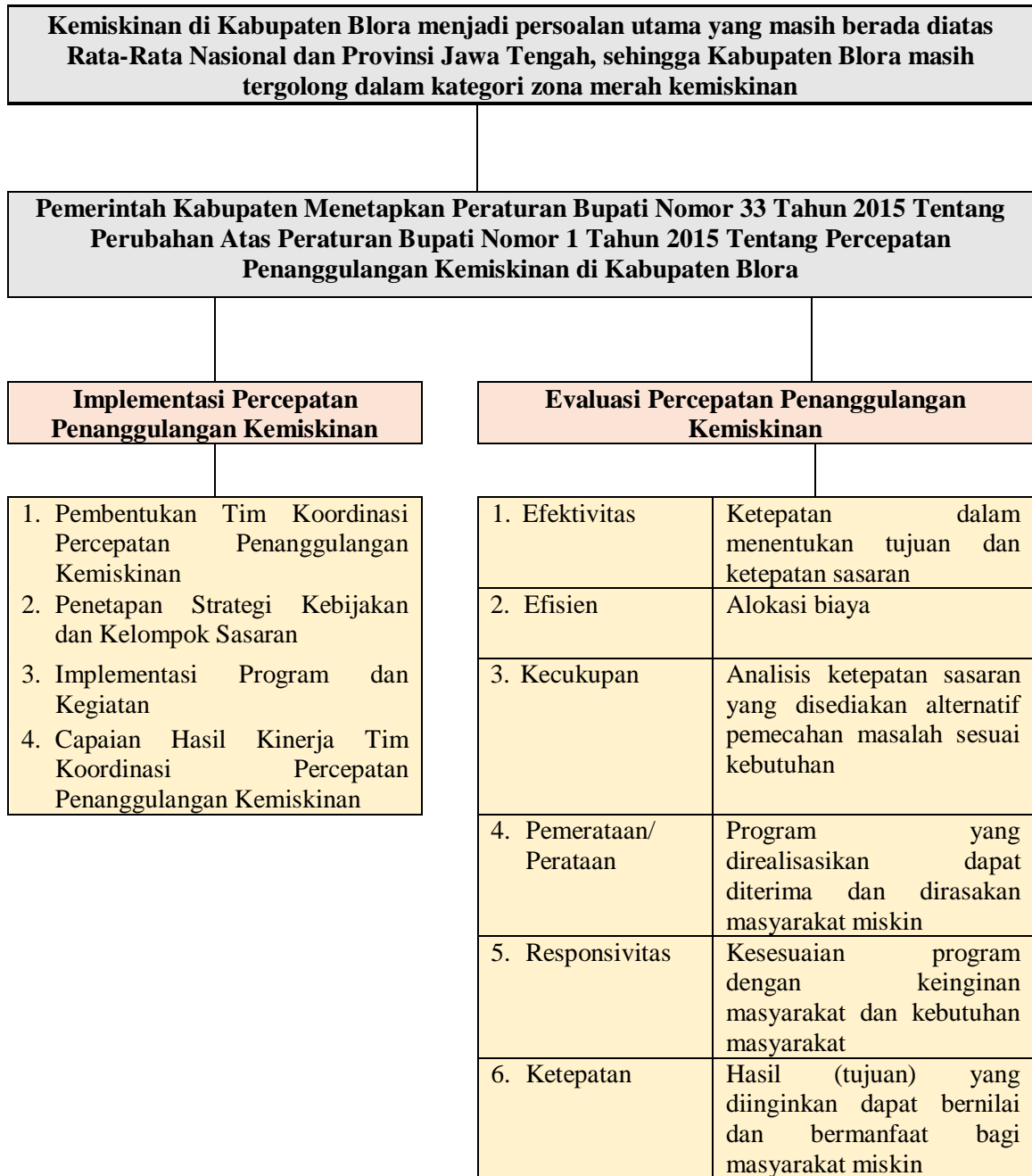
1. Efektivitas yaitu suatu keadaan yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan, yang mana output atau keluaran harus sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Dalam penelitian ini, menggunakan ketepatan dalam menentukan tujuan dan ketepatan sasaran untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
2. Efisiensi yaitu berkaitan dengan seberapa banyak usaha yang dilakukan guna mencapai hasil yang diinginkan, dengan tidak menggunakan banyak tenaga, biaya, maupun waktu. Untuk mengukur tingkat efisien dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alokasi biaya sebagai tolak ukur dalam pengukuran efisiensi. Sehingga dalam pelaksanaan penanggulangan

kemiskinan semakin menggunakan biaya yang minimal maka akan mendapatkan hasil yang maksimal.

3. Kecukupan yaitu aspek yang digunakan untuk melihat sejauhmana pencapaian hasil yang diinginkan. Untuk mengukur tingkat kecukupan ini dapat dengan menganalisis hasil pencapaian yang dicapai beserta ketepatan sasaran untuk melihat apakah terdapat alternatif pemecahan permasalahan selama pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
4. Pemerataan/perataan yaitu suatu keadilan yang diberikan dan diperoleh dari kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan ini. Aspek pemerataan digunakan untuk melihat banyaknya program yang dapat diterima dan dirasakan oleh masyarakat miskin.
5. Responsivitas yaitu kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan dari masyarakat. Dalam penelitian ini, aspek responsivitas digunakan pemerintah untuk mengetahui kebutuhan masyarakat miskin, kemudian menyediakan kebutuhan tersebut sesuai dengan yang diharapkan masyarakat miskin.
6. Ketepatan yaitu suatu keadaan yang difokuskan pada hasil atau tujuan yang diinginkan. Pada penelitian ini, aspek ketepatan digunakan untuk melihat apakah dalam program penanggulangan kemiskinan dapat diterima oleh masyarakat miskin serta memberikan dampak langsung yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat miskin.

Konsep dari penelitian ini dapat dibuat menjadi kerangka berpikir, sebagaimana dapat dilihat pada bagan berikut ini:

**Tabel 1.4
KERANGKA BERPIKIR**



1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif atau seringkali disebut dengan metode kualitatif deskriptif. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya penting seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mengumpulkan informasi yang spesifik dari partisipan, menganalisis data dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum dan menafsirkan arti dari data. Selain itu bersifat deskriptif karena penelitian ini bermaksud untuk memberikan gambaran secara terperinci, sistematis dan menyeluruh mengenai sesuatu yang berhubungan dengan penyusunan ilmiah. Penggunaan desain penelitian ini bertujuan untuk memaparkan, menggambarkan, menganalisa terkait evaluasi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blora. Data yang digunakan berasal dari wawancara dan studi kepustakaan.

1.7.2 Situs Penelitian

Situs penelitian ini menempatkan lokasi atau daerah penelitian akan dilaksanakan. Lokasi atau daerah yang akan menjadi lokasi dalam penelitian ini yaitu Kabupaten Blora. Kabupaten Blora dipilih menjadi lokasi atau wilayah penelitian karena Peraturan Bupati yang digunakan sebagai acuan mengevaluasi percepatan penanggulangan kemiskinan dalam penelitian ini adalah Peraturan Bupati Blora.

1.7.3 Subjek Penelitian

Individu atau kelompok yang bisa menggambarkan tentang apa yang diketahui terkait suatu yang berkaitan dengan fenomena ataupun kasus penelitian disebut dengan subjek penelitian. Dengan kata lain subjek penelitian adalah seorang informan. Kriteria yang menjadi pedoman atau penentuan informasi, yaitu seseorang yang terlibat langsung dengan persoalan yang hendak diteliti tentang program-program yang dilaksanakan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blora. Oleh sebab itu, subjek penelitian ini dapat dicari melalui informasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora khususnya Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dan masyarakat sekitar yang memperoleh bantuan terkait kemiskinan.

1.7.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif deskriptif, yaitu data yang berada dalam bentuk narasi bukan bentuk angka. Data diperoleh melalui bermacam teknik pengumpulan data seperti melakukan *interview* dengan informan, menganalisis dokumen yang relevan dengan penelitian, dan bentuk lainnya yang berupa gambar. Selain itu, sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua macam data yang didapatkan dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari sumber penelitian melalui jawaban atas pertanyaan wawancara kepada informan yang diajukan oleh peneliti. Dari penelitian ini, data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, yang mana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan sekretaris dari Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Blora, serta hasil wawancara dengan beberapa masyarakat sekitar yang memperoleh bantuan terkait kemiskinan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data sekunder dari studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dari buku-buku literatur seperti, dokumen (Peraturan Bupati Blora Nomor 1 dan Nomor 33 tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Laporan Kinerja Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Blora, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Blora, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora tahun 2016-2021 & 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora tahun 2020, dan lain sebagainya), internet, serta sumber bacaan lainnya yang sesuai dengan penelitian ini.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan bahan-bahan yang relevan. Oleh sebab itu, untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka metode pengumpulan yang dilakukan dalam penelitian secara kualitatif dapat melalui:

a. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan suatu proses untuk memperoleh keterangan secara langsung melalui percakapan yang dilakukan dua pihak atau dengan tanya jawab melalui tatap muka antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Berikut nama-nama narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini.

No.	Nama	Jabatan/Kedudukan
1.	A. Mahbub Djunaidi, S.Pd, M.Si	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
2.	Susi Endayani, SE, MM	Analisis Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
3.	Tarmini	Masyarakat desa penerima bantuan
4.	Pariyati	Masyarakat desa penerima bantuan

Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data yang dapat dijadikan sumber penilaian dalam rangka menganalisis terkait perannya dalam pelaksanaan kebijakan tersebut serta hasil pencapaian dan pelaksanaan dari program-program yang direncanakan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blora.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan berasal dari data sekunder dengan mengumpulkan data dari buku-buku literatur seperti, dokumen (Peraturan Bupati Blora Nomor 1 dan Nomor 33 tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Laporan Kinerja Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Blora, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Blora, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora tahun 2016-2021 & 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora tahun 2020, dan lain sebagainya), internet, serta sumber bacaan lainnya yang sesuai dengan penelitian ini. Melalui teknik ini, peneliti mengumpulkan data dengan mempelajari bahan-bahan yang berasal dari, buku, jurnal, situs-situs internet dan lainnya.

1.7.6 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis dan interpretasi data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data yang dilakukan bersifat induktif bersumber pada fakta-fakta yang ditemui di lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian kualitatif, proses analisis data dimulai dengan mereduksi data atau memilah-milah data mentahan untuk dikelompokkan dalam pokok permasalahan yang sesuai fokus penelitian, hal ini bertujuan supaya data yang sama dapat berkelompok ke bagian yang

relevan. Setelah itu adanya penyajian data, dimana peneliti berupaya untuk mengklasifikasikan data atau menyajikan data yang sesuai dengan penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari rangkuman wawancara dan data-data lain yang didukung oleh studi kepustakaan. Kemudian yang terakhir adalah penarikan kesimpulan, dimana tahap akhir dari analisis data dengan cara mengambil keputusan atau menjawab atas pertanyaan penelitian dari rumusan masalah melalui hasil data yang telah disusun.

1.7.7 Kualitas Data

Penelitian dapat memperoleh kualitas data, maka dapat dilakukan dengan cara uji kualitas data. Salah satu cara yang digunakan peneliti untuk menguji kualitas data dalam penelitian ini yaitu melalui cara triangulasi. Triangulasi untuk pengujian kualitas data ini dapat diartikan sebagai pengecekan data yang berasal dari berbagai macam sumber, cara, dan berbagai waktu (Sugiyono, 2013). Terdapat 3 macam triangulasi yang digunakan untuk menguji kualitas data diantaranya, triangulasi sumber (menguji kualitas data dengan memeriksa data yang diperoleh dari berbagai sumber); triangulasi pengumpulan data (menguji kualitas data dengan cara mencocokkan data yang diperoleh dari sumber yang sama dengan cara berbeda, misal hasil wawancara dicek dengan data kepustakaan atau dokumentasi); dan triangulasi waktu (menguji kualitas data dengan cara melakukan mengecek/mencocokkan wawancara atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda).